

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Fenomena pemaknaan bahasa yang rumit muncul karena selain adanya penggunaan bahasa yang konotatif, juga karena makna bahasa itu sangat dipengaruhi konteks pemakaiannya. Ketidakterlibatan konteks ketika digunakan suatu bahasa yang konotatif dan bukan denotatif, akan menyulitkan pemaknaan bahasa tersebut. Gejala seperti ini umumnya banyak dijumpai pada tataran wacana dalam bentuk percakapan. Dalam bentuk seperti ini, di samping makna, hal lain yang harus diperhatikan ialah citra tuturan sehingga tercapai maksud atau efek yang diharapkan. Di sinilah ilmu pragmatik sangat berperan dalam pengungkapan maksud suatu tuturan tersebut, karena pragmatik tidak hanya melihat bahasa dari bentuknya, tetapi juga melihat di mana dan dalam situasi apa bahasa itu digunakan. Salah satu cabang dari ilmu pragmatik adalah implikatur, yakni maksud tersirat dari sebuah bahasa.

Implikatur percakapan merupakan satu di antara beberapa cara penyampaian maksud dengan ilokusi tidak langsung. Implikatur percakapan dipilih karena penyampaiannya membutuhkan kompetensi komunikatif tertentu, misalnya kompetensi penataan struktur tuturan dan kepekaan konteks komunikasi. Di samping itu, frekuensi pemakaiannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk lain dalam cara penyampaian maksud dengan ilokusi tidak langsung.

Zaman reformasi berdampak perubahan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah sistem pemilihan kepala daerah yang langsung dipilih oleh rakyat. Untuk mengetahui profil ataupun visi misi pasangan kandidat calon kepala daerah, forum debat kandidat menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah tersebut. Forum debat kandidat sebagai salah satu program televisi yang tentu saja akan dilihat oleh hampir seluruh rakyat. Hal ini tentu akan melahirkan nilai personal seseorang dalam politik. Seperti yang diungkapkan oleh Nimmo (2001: 13) bahwa nilai tidak lain adalah preferensi yang dimiliki orang terhadap tujuan tertentu atau cara tertentu dalam melakukan sesuatu.

Debat kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta merupakan salah satu fenomena sosial belakangan ini. Fenomena ini terjadi dikarenakan Jakarta merupakan ibu kota negara, miniatur peta perpolitikan di Indonesia. Dengan gejolak-gejolak politik yang terjadi sehingga proses politik Pilkada DKI Jakarta 2017 begitu menarik perhatian nasional dan internasional. Momentum ini menjanjikan lahirnya praktek demokrasi yang didukung oleh nilai-nilai politik yang rasional, dengan harapan rakyat secara cerdas dan kritis memilih pemimpin yang memiliki kapasitas, kualitas dan integritas. Menurut Nimmo, (2001:125) berpartisipasi dalam politik merupakan konsekuensi komunikasi yang mempolitikkan. Yakni melalui pengalaman sosialisasi orang mengembangkan kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang relevan dengan politik. Hal ini mengakibatkan orang dewasa berperan secara aktif dalam politik.

Debat merupakan salah satu peristiwa komunikasi. Menurut Dipodjojo (1984:45) debat adalah suatu proses komunikasi lisan, yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Debat juga bertujuan untuk mencapai kemenangan dalam suatu hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hendrikus (1991:120) debat adalah saling adu argumentasi antarpribadi atau antarkelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa debat merupakan komunikasi lisan sebagai bentuk adu argumen dalam mempertahankan pendapat yang dilakukan antarpribadi atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai kemenangan.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No 12 tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pada pasal 5 ayat 3 poin a disebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi kampanye yang salah satunya debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

Pada pasal 21 ayat 4 PKPU No 12 tahun 2016, disebut bahwa debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak tiga kali pada masa kampanye. Dalam PKPU No 12 Tahun 2016 juga disebutkan bahwa debat publik ini disiarkan oleh lembaga penyiaran publik atau swasta, baik secara langsung maupun tunda. Sehingga penyelenggaraan debat ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

pemilih terkait visi-misi dan program dari masing-masing kandidat pemimpin daerah.

Peristiwa berbahasa dalam debat kandidat tersebut erat kaitannya dengan kekuasaan demi mencapai tujuan politik, yakni mengambil simpati masyarakat untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Debat mempunyai unsur dan aturan khusus dalam pelaksanaan yang harus ditaati oleh peserta debat. Namun, demi mencapai tujuan kemenangan, orang mudah dikuasai oleh emosi dan tidak lagi berpikir secara rasional. Maka tak heran jika mereka mulai bersikeras dan bersitegang mempertahankan pandangan atau gagasannya, meskipun secara objektif hal itu kurang penting. Pelanggaran berbahasa yang dilakukan oleh pasangan kandidat dalam diindikasikan sebagai bentuk strategi politik dalam debat. Pelanggaran berbahasa dalam konteks politik tidak semata dilakukan kecuali tanpa adanya tujuan politis yang melatarbelakanginya. Adapun tujuan utama pelanggaran tersebut salah satunya adalah untuk mengambil simpati dari masyarakat luas.

Pada hakikatnya setiap tuturan menghasilkan implikatur atau dapat mengimplikasikan tuturan lain begitupun halnya dengan pelanggaran prinsip kerja sama yang dapat menghasilkan implikatur atau dapat mengimplikasikan tuturan lain. Ada alasan yang membuat seorang partisipan melanggar ketentuan prinsip kerja sama. Alasan-alasan tersebut di antaranya terkait aspek etika atau kesopanan, tidak ingin menyampaikan maksudnya secara terang terangan, dan ingin menyindir secara halus.

Tema yang dibahas dalam acara debat Pilkada cagub-cawagub DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta putaran kedua pada tanggal 12 April 2017 yaitu 'Dari Masyarakat Untuk Jakarta' sementara subtema yang debat yakni transportasi, reklamasi, tempat tinggal, pelayanan publik berupa pendidikan, kesehatan, serta UMKM atau dunia usaha.

Tuturan dialog partisipan dalam acara debat cagub-cawagub DKI Jakarta putaran kedua 12 April 2017 banyak mengandung implikatur percakapan sebagai akibat terhadap pelanggaran maksim-maksim prinsip kerja sama. Berikut sedikit ulasan tuturan dialog partisipan yang mengandung implikatur percakapan yang ditimbulkan dari pelanggaran prinsip kerja sama.

Contoh dialog:

(1) Sukarto: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Sukarto, nama topnya Karto ya. Saya pengen bertanya kepada kedua kandidat calon gubernur. Pak kami ini warga rusun Jati Negara yang direlokasi akibat normalisasi Kali Ciliwung. Kami menderita tidak saja secara ekonomi, tapi juga secara mental, kami benar-benar merasa *drop*. Saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor, padahal kami harus menanggung biaya bulanan terus-menerus. Bila bapak terpilih, apakah bapak tega untuk terus-menerus membebani kami dengan biaya rusun yang bocor ini? Terima kasih pak.

Ahok: Terima kasih pak Karto, memang harus kita akui beberapa rusun yang dibangun dengan kontraktor maling, itu berakibat seperti itu, makanya sekarang kenapa kami memperlambat, kami lebih baik pilih yang mutu yang baik. Kalau bapak perhatikan rusun-rusun yang bapak tinggal kalau

soal tidak bayar bagaimana. Memang rusun itu tidak bayar sebenarnya bapak ibu. Rusun itu tidak bayar, itu hanya kontribusi, kontribusi untuk pemeliharaan lingkungan, itupun kami subsidi 80%. Nah, yang tidak mampu bayar, beberapa sudah kami bayarkan lewat basis juga lewat operasional saya sebetulnya, tapi setelah kami teliti, hanya 30% yang tidak mampu bayar, 70% tu tidak mau membayar, nah ini yang sedang kita lagi bantu, termasuk kita akan bangun di Ciangir. Harus kita akui waktu kami memindahkan itu ada unsur sosial yang kita tidak perhatikan waktu itu. Misal contoh, tadi bisa pinjam cabe pinjam minyak goreng, waktu pindah tetangganya berubah. Nah sekarang untuk yang pindah baru, dia boleh sama-sama tinggal di satu lantai. Nah itu yang kami lakukan , termasuk tempat dagang. Kami mulai pikirkan sekarang untuk membongkar pagar-pagar rusun seperti Jati Negara supaya membangun kios-kios dagang. Nanti kedepan semua rusun kami itu kios dagangnya itu di tepi jalan sehingga mobil yang lewat bisa mampir, inilah yang harus kami akui, ada kesalahan disain yang masa lalu yang terus kami perbaiki sekarang. Saya mohon maaf dan saya harap bapak ibu bisa bersabar.

Tuturan Ahok dalam contoh dialog (1) telah melakukan pelanggaran maksim kualitas dan maksim relevansi, karena jawaban Ahok tersebut kurang berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Sukarto. Pelanggaran prinsip kerja sama dari tuturan Ahok tersebut maka memunculkan jenis implikatur berskala dan implikatur percakapan umum yang dapat dilihat pada kalimat bergaris bawah pada contoh dialog (1).

Beranjak dari situlah kemudian peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap acara debat dengan tema tersebut. Dalam penelitian ini peneliti

mengambil edisi debat pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada hari Rabu, 12 April 2017. Alasannya yaitu sebagai dasar pengetahuan terhadap sesuatu yang terjadi antara pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta sehingga diharapkan ini menjadi fondasi awal pengetahuan bagi peneliti.

Peneliti tertarik ingin mengetahui pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi dalam acara debat cagub-cawagub DKI Jakarta tahun 2017. Akibat pelanggaran prinsip kerja sama itu maka apa implikatur atau hal yang diimplikasikan dalam pelanggaran tersebut. Tentunya ini akan dapat menambah informasi sehingga mengetahui lebih dalam hal-hal yang terjadi dalam arena perdebatan tersebut, suatu hal yang menjadi perhatian masyarakat luas. Disertakan pula fungsi implikatur dari pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan. Pada akhirnya akan dapat diketahui maksim yang sering dilanggar oleh partisipan dalam interaksi komunikasi debat, fungsi implikatur yang paling banyak digunakan dalam acara debat tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Impikatur Percakapan dalam Acara Debat Cagub–Cawagub DKI Jakarta Tahun 2017.”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dalam melakukan penelitian, masalah yang diteliti harus diidentifikasi dengan jelas. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ditemukan beberapa masalah yakni sebagai berikut:

1. Jenis prinsip kerja sama yang dilanggar pada debat cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017
2. Jenis implikatur yang digunakan pada debat cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017
3. Fungsi implikatur pada acara debat cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017
4. Implikatur apa saja yang muncul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama tersebut

### **1.3. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian ini mengarah dan mengena pada sasaran yang diinginkan. Sebuah penelitian perlu dibatasi ruang lingkungannya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang dapat berakibat penelitian tidak terfokus. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada pelanggaran prinsip kerja sama yang muncul saat acara debat cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017 dan apa saja implikatur yang timbul akibat terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama tersebut

### **1.4. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi penelitian dan agar tidak jauh menyimpang dari inti penelitian, oleh sebab itu dibawah ini akan diuraikan beberapa masalah penelitian yang menjadi fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja jenis prinsip kerja sama yang dilanggar dalam acara debat cagub dan cawagub DKI Jakarta 2017?
2. Implikatur apa saja yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kerja sama tersebut?



### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan jenis-jenis pelanggaran prinsip kerja sama yang digunakan dalam acara debat cagub cawagub DKI Jakarta tahun 2017
2. Mendeskripsikan implikatur percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip kerja sama tersebut.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis. Berikut ini adalah uraian dari manfaat teoretis dan manfaat praktis.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan bidang pragmatik, temuan penelitian ini diharapkan menjadi satu model kajian makna situasi kontekstual dalam komunikasi, memperkaya khazanah ilmu kebahasaan, terutama dalam kajian pragmatik yang membahas implikatur percakapan dan prinsip kerja sama, dan memperkaya kajian linguistik yang berhubungan dengan konteks sosial yang mencakupi unsur situasi, budaya dan ideologi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap materi dan teori pengajaran dalam bidang pragmatik, temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian berikutnya. temuan penelitian ini diharapkan dapat menggugah

perhatian para calon kepala daerah terhadap pemakaian bahasa berdasarkan prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun.



THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY